

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata skor dan persentase jawaban responden serta pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan secara seksama pada bab sebelumnya dapat ditarik simpulan penelitian sebagai berikut :

1. Secara umum, pemberdayaan masyarakat di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi melalui pembangunan fisik telah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tanggapan responden yang menunjukkan angka 65,55% termasuk dalam kategori baik (menurut Koentjaraningrat, 1991: 260). Secara detail, tanggapan responden terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan fisik di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi adalah : (1) tahap perencanaan memperoleh tanggapan responden baik (74,63%); (2) tahap pelaksanaan memperoleh tanggapan responden sedang (47,19%); (3) tahap monitoring dan evaluasi memperoleh tanggapan responden baik (74,84%). Hasil tanggapan responden dari ketiga tahapan pemberdayaan masyarakat di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tersebut yang perlu dicermati adalah pada tahap pelaksanaan yang memperoleh kategori sedang (41 – 60%), sehingga dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang infrastruktur.
2. Hambatan yang berhasil diidentifikasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan fisik di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi adalah kurang terkuasainya metode dan teknik partisipasi oleh masyarakat, sehingga perlu diberikan pelatihan secara lebih sering dalam kegiatan yang sejenis. Selain itu, teridentifikasi juga bahwa pemerintah desa yang masih menganggap masyarakat sebagai obyek pembangunan, bukan sebagai subyek/pelaku pembangunan sepenuhnya. Jadi, masyarakat tersebut

harus diberikan kepercayaan yang lebih luas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi hambatan dalam pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan fisik di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, adalah sebagai berikut : (1) memberikan prioritas bagi pemborong dari masyarakat setempat sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur desa; (2) mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sebagai pekerja; dan (3) mengefektifkan peran ketua RT dan ketua RW untuk menginformasikan rencana program pembangunan infrastruktur dan melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam proses *monitoring* dan *controlling* terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

5.2 Saran

Kurangnya peranan Pemerintah Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dalam memberdayakan masyarakat bidang pembangunan Fisik desa, tidak berjalannya pemberdayaan masyarakat di desa tersebut, tidak dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan desa, di mana yang mengerjakan proyek pembangunan di Desa tersebut adalah pemborong yang berasal dari daerah lain, dan hal ini mengindikasikan pemerintah desa tidak mengikutsertakan masyarakat setempat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi agar melakukan pengkajian dan peningkatan pemahaman tentang prinsip dan tujuan pembangunan infrastruktur desa, termasuk pemberdayaan masyarakat desa.
2. Meningkatkan upaya keterbukaan seperti sosialisasi yang lebih masif, akuntabilitas, dan peran yang lebih nyata sebagai bentuk pelayanan dan keberpihakan terhadap masyarakat desa.
3. Masyarakat harus bersatu dalam suatu wadah yang terorganisir dan independen sebagai alat mediasi dan penyalur aspirasi dan partisipasi. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan ada kekuatan yang lebih kuat untuk menyampaikan saran

dan masukan kepada pemerintah desa dalam proses perumusan kebijakan pembangunan, *monitoring* dan *controlling* maupun terhadap implementasi kebijakan pemerintah desa.